

TATA KRAMA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Agus Fathuddin Yusuf

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: fathuddin@yahoo.com

Abstract

Political communication is not easy to implement in the sense of achieving an optimal level of effectiveness. It takes skill, sincerity, and empathy to become a proficient political communicator. Political communicators must have high credibility because credibility is the most important element in gaining public trust. Credibility here concerns the trustworthiness, expertise, and attractiveness of a communicator. Other supporting factors are openness, calmness, and sociability, and charisma. This paper aims to make the public better understand their role in political life, especially in expressing opinions. Expressing opinions and criticizing the authorities is part of the democratic process. But the message conveyed must be by the norms and rules that apply in our country, Indonesia.

Keywords: *political communication, communication ethics, the role of communication.*

Abstraksi

Komunikasi politik tidak mudah dilaksanakan dalam arti untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Butuh kecakapan, ketulusan, dan empati untuk menjadi komunikator politik yang cakap. Komunikator politik harus mempunyai kreadibilitas yang tinggi, karena kreadibilitas merupakan unsur terpenting guna memperoleh kepercayaan masyarakat. Kreadibilitas disini menyangkut keterpercayaan, keahlian dan daya tarik dari seorang komunikator. Faktor pendukung lainnya adalah keterbukaan, ketenangan, dan kemampuan bersosialisasi serta karisma. Tujuan dalam penulisan ini adalah supaya masyarakat lebih memahami peran sertanya dalam kehidupan berpolitik terutama dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap penguasa merupakan bagian dari proses demokrasi. Tetapi pesan yang disampaikan harus sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di negara kita Indonesia.

Kata kunci : *komunikasi politik, etika berkomunikasi, peran komunikasi.*

A. PENDAHULUAN

JAGAT maya masih ramai membicarakan konten yang diunggah BEM UI di media sosialnya, yaitu Jokowi: *"The King of Lip Service"* yang menuai polemik. "Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis @BEMUI_Official sambil mengunggah sebuah poster bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service", Sabtu (26/6/2021).Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia Dr Tito Latif kemudian memanggil Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra dan Wakil Ketua BEM UI Yogie untuk diklarifikasi perihal konten tersebut. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI Amelita Lusiana menyebutkan, pemanggilan tersebut sebagai langkah urgen akibat permasalahan yang timbul sehari setelah unggahan BEM UI mulai ramai dibicarakan. Amelita menegaskan, pemanggilan itu merupakan bagian dari langkah pembinaan. "Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," kata Amelita Lusiana. (Kompas.com,30/06/2021)

Pemanggilan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI juga menjadi polemik berkepanjangan. Ada pihak yang menilai pemanggilan tersebut sebagai pengekangan kebebasan berpendapat di depan umum. Pemanggilan itu dinilai sebagai sikap antidemokrasi dan lain-lain. Beberapa BEM dari kampus perguruan tinggi lain, tanpa diminta juga memberikan dukungan kepada BEM UI. Bahkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Ichya Halimudin menyebut pemanggilan tersebut menunjukkan rektorat UI antidemokrasi.

Pihak-pihak yang menyalahkan BEM UI, artinya membela Presiden Joko Widodo ‘dituduh’ sebagai buzzer pemerintah. Sebenarnya sampai dimana batas-batas kebebasan menyampaikan kritik kepada simbol-simbol negara? Adakah tata karma dalam komunikasi politik yang mestinya digunakan agar tidak membuat kegaduhan pada saat bangsa Indonesia prihatin menghadapi

wabah Covid-19? Tulisan ini mengurai bagaimana melakukan kritik yang tidak menyakiti dan membahas tata karma politik yang santun dan mengasyikkan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Politik

Menurut McMair Komunikasi politik adalah Segala tujuan komunikasi tentang politik, hal ini meliputi semua bentuk tentang komunikasi yang dilakukan oleh politian dan lainnya politik aktor untuk tujuan mencapai Objectif tertentu. Selain itu komunkasi politik juga didefinisikan sebagai Komunikasi tentang mereka (politisi politikus atau non potikus) dan kegiatan mereka sebagai pembuat laporan berita, editorial, dan bentuk lain dari diskusi media politik.¹ Dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Secara umum unsur-unsur komunikasi politik meniktibertkan para unsur-unsur komunikasi, yaitu: Komunikator. Komunikator adalah orang yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini dikhususkan pada komunikator politik yaitu para calon pejabat atau bahkan pejabat sekali pun yang memunyai kepentingan dalam perpolitikan. Seorang komunikator politik, identik dengan seorang orator yang pintar melakukan retorika politik. Retorika merupakan seni berbicara dan teknik mempengaruhi. Ada tiga kategori komunikator dalam politik: 1) aktivis sebagai komunikator politik. Yaitu menyuarakan kepentingan kelompok dengan idealisme tertentu. 2) profesional sebagai komunikator politik. Yaitu mereka yang bekerja dan dibayar untuk kepentingan politik tertentu dari partai, atau kandidat. 3) Pejabat sebagai komunikator politk. Mereka yang bercita-cita menduduki atau memperjuangkan posisi tertentu dalam sesuatu jaringan kekuasaan.²

¹ Rully Choirul Azwar, *Poltik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era* (Jakarta: Grasindo, 2009) hal. 26

² Dewa Ayu Hendrawathy Putri, “Difusi Inovasi Pemasaran Politik Indonesia” *Jurnal Communication* vol 4. No. 2 (Oktober 2013) hal. 70

McNair menjelaskan tentang fungsi dasar dari komunikasi politik³: 1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Fungsi dari komunikasi politik disini sebagai pengamat dan melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi dimasyarakat. 2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi. Peran jurnalis dalam membuat laporan atau berita politik sangat penting. Liputan yang mendidik tentu tidak saling menjatuhkan, atau mencaci maki. Adapun liputan harus bersifat objektif, sesuai dengan fakta tanpa penambahan bumbu profokasi. 3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk pendapat publik dan mengembalikan opini tersebut kepada masyarakat. 4. Membuat laporan/ berita yang ditujukan kepada pemerintah atau institusi politik. Media dalam hal ini berfungsi sebagai penjaga dalam membantu terciptanya pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. 5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran pembela yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program institusi dapat disalurkan kepada media massa.

Komunikator politik harus mempunyai kreadibilitas yang tinggi, karena kreadibilitas merupakan unsur terpenting guna memperoleh kepercayaan masyarakat. Kreadibilitas disini menyangkut keterpercayaan, keahlian dan daya tarik dari seorang komunikator. Faktor pendukung lainnya adalah keterbukaan, ketenangan, dan kemampuan bersosialisasi serta karisma. Semua aspek diatas sangat berpengaruh untuk memikat orang-orang guna meraih simpati masyarakat dalam penyampaian pesan/ tujuan pesan dari komunikasi. Pesan politik dapat menarik perhatian ketika pesantersebut dapat memberikan harapan. pada dasarnya hanyalah perlu memerhatikan intensitas dan pokok persoalan yang dihadapi. Maksudnya pesan dibuat untuk apa?. Apakah ditujukan untuk kebutuhan pribadi (*personal needs*) atau kelompok (*sosial need*).

³ Belli Nasution “Komunikasi Politik” Disajikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi, 2012

Etika Komunikasi Politik

Sebagai salah satu kajian filsafat, Etika berbicara tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbuat, apakah perbuatan itu baik dan buruk. etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Keistimewaan yang dimiliki manusia yaitu kemampuan berpikir. Manusia sadar akan dirinya, siapa saya dan apa yang harus saya perbuat dan sebagainya, sehingga manusia akan selalu berpikir sebelum melakukan tindakan. Manusia selalu akan berpikir dan menimbang, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan harkat kemanusiannya atau justru sebaliknya. Manusia dapat belajar berinteraksi dengan manusia lainnya karena ada komunikasi. Komunikasi melibatkan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam berinteraksi diperlukan norma atau aturan yang berperan sebagai pengendali guna tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Upaya mewujudkan tertibnya masyarakat adalah dengan etika komunikasi politik. Dalam interaksi komunikasi politik fungsi dari etika juga sebagai pengetahuan rasional yang mengajak pelaku politik agar berkomunikasi dengan baik.

Aktor politik dalam berkomunikasi hendaknya harus mengajarkan kejujuran dalam berkomunikasi dan transparansi pesan yang disampaikan. Artinya para pemimpin dan aktor politik dituntut secara etis untuk menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan dengan mendorong berbagai ragam argumen dan pendapat. Johannesen (1996), mengemukakan, dalam perspektif politik diperlukan empat pedoman etika, yaitu: 1. Menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dengan memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. 2. Mengutamakan motivasi umum dari pada motivasi pribadi. 3. Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat. Selanjutnya, Nilsen (dalam Johannesen, 1996), mengatakan bahwa untuk mencapai etika komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut: 1. Penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungannya dengan si pembicara. 2. Penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud dan integritas orang lain. 3.

Sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. 4. Penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif 5. Terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan.

Persoalan penting dalam komunikasi adalah Komunikasi yang beretika. Sering kita jumpai dalam keseharian kita dimana penyampaian pesan kurang santun hal ini dikarenakan etika komunikasi sering terpinggirkan. Etika berkomunikasi belum membudaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. METODE

Tulisan ini merupakan hasil dari kajian studi kasus (*case study*) dengan menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pembelajar ilmu komunikasi dan media, penulis ingin memberikan bagaimana pentingnya etika dalam komunikasi politik pada era digital sekarang ini. Pentingnya beretika dalam berkomunikasi. Tumbuh berkembangnya media sosial ketika tidak dibarengi dengan etika komunikasi yang baik dan sanksi dapat berkontribusi pada berita-berita yang dapat menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoax.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communicare” yang artinya “menyampaikan”. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan,

dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pakar komunikasi dan pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan komunikasi memiliki peran sentral dalam aktivitas politik di berbagai tingkatan, dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Komunikasi politik tidak mudah dilaksanakan dalam arti untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Butuh kecakapan, ketulusan, dan empati untuk menjadi komunikator politik yang cakap. (Antara 16 Juni 2020). Tjipta Lesmana menerangkan, komunikasi politik wajib dilakukan dengan cara yang benar demi menghindari tindak komunikasi politik yang kurang elok. Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik itu menyarankan agar audiens berkomunikasi politik dengan didasari pada semangat kasih terhadap sesama. Tjipta mengatakan, masalah komunikasi politik di Tanah Air sering timbul karena politik pada dirinya sendiri memiliki tiga aspek besar, yaitu usaha mendapatkan kekuasaan, mendistribusikan kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan, yang meliputi mempertahankan dan mentransfer kekuasaan.

Dalam konteks ‘*The King of Lip Service*’ BEM MUI, harusnya bisa digali lebih dalam lagi apakah konten dan narasi yang dibangun murni suara hati yang bersih dari mahasiswa, atau ‘pesanan’ dari lawan politik Presiden Joko Widodo. Bila mencermati jawaban Presiden Jokowi sebagai respon dari tuduhan ‘*The King of Lip Service*’, tampaknya perlu penjelasan bagaimana memahami batas-batas kebebasan berekspresi, berpendapat dan menyampaikan kritik kepada orang lain. Apalagi yang dikritik adalah sosok kepala negara Republik Indonesia. "Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi *Covid-19*," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya melalui YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Presiden Jokowi, kritik boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Bahkan Presiden menekankan, kritik dari mahasiswa tidak perlu

dihalangi oleh pihak kampus. Menurut Presiden pihak universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, tetapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan.

Bahkan dengan ekspresi yang datar dan senyum Kepala Negara juga mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. "Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini *klemar-klemer*, ada yang bilang juga saya itu *plonga-plongo*, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter," kata Presiden Jokowi. Garis tebalnya adalah kata budaya tata Krama, sopan santun, adat istiadat dan dalam agama Islam disebut akhlak atau budi pekerti.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia kurang riset terkait kritik soal '*Jokowi king of lip service*'. Mulanya, Ade Armando mengatakan kritik yang dibuat oleh BEM UI itu sesuatu yang sah dalam berdemokrasi. Namun, menurutnya, cara kritik yang mereka sampaikan tidak pintar. Apa yang disampaikan BEM UI itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dilindungi, sesuatu yang sah dalam demokrasi. "Tapi pada saat yang sama, karena mereka menyerang Presiden Jokowi dengan cara yang menurut saya tidak pintar, maka sebagai seorang anggota sivitas UI harus menyatakan bahwa nggak beres nih kalian cara berpikirnya," kata Ade Armando dalam debat virtual, seperti dikutip Detik.com Senin (28/6/2021)

Santa Rusmalita dalam tulisan "Komunikasi Efektif Membangun Kearifan Dalam Dakwah" dimuat di <https://jurnaliainpontianak.or.id/menyebutkan>, Ada beberapa bentuk komunikasi yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Yaitu dengan *qaulan baliigha*, *qaulan maisuura*, *qaulan layyina*, *qaulan*, *ma'ruufa*, *qaulan kariima*, *qaulan sadiida*. **Qaulan baligha**. Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan Baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat

sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele.

Qaulan maisura. Qaulan maisura adalah perkataan yang mudah, yaitu yang mudah dicerna oleh komunikan. Pada prinsipnya menyampaikan pesan dakwah merupakan segala ucapan, tingkah laku yang berusaha untuk menjadikan mad'uagar mereka mengenal tuhan. Secara lugas Allah menggambarkan bahwa berbicara pada golongan tertentu harus dengan qaulan maisura (perkataan yang mudah).

Qaulan layyina. Secara bahasa layyina artinya lemah lembut. Jadi qaulan layyina adalah perkataan yang lemah lembut. Menggunakan perkataan yang lemah lembut disampaikan Allah pada Nabi Musa as saat harus berdialog dengan Fir'aun. Firman Allah: Artinya: "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Thaha: 44).

Qaulan ma'rufa. Secara harfiah Ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal, dimengerti dan dipahami serta dapat diterima oleh masyarakat. (Asep Muhiddin, 2002:45). Perbuatan ma'ruf itu jika dikerjakan dapat diterima dipahami oleh manusia, dan dipuji karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang memfungsikan akal sebagai ciri khas dirinya. Kebalikan dari kata ma'ruf adalah munkar, yakni yang dibenci, tidak disenangi, dan ditolak oleh masyarakat karena tidak patut, tidak pantas, tidak selayaknya dikerjakan oleh manusia berakal. Dalam bahasa Inggris, ma'ruf mirip dengan *common sense*, yakni logis dan masuk akal.

Qaulan kariima. Kariima artinya mulia. Qaulan Kariima artinya perkataan yang mulia, yang lemah lembut dan merendahkan diri. Qaulan Kariim khusus diperintahkan saat berhadapan dengan orang tua. **Qaulan sadida.** Sadida berarti jelas, jernih, terang. Achmad Mubarak menyampaikan bahwa secara umum, dakwah dilakukan dengan qaulan sadida, yakni mengenai sasaran, benar substansinya, dan benar bahasanya. Dalam al-Quran, konteks qaulan sadida

diungkapkan pada pembahasan mengenai wasiat (QS an-Nisa [4]: 9) dan tentang buhtan (tuduhan tanpa bukti) yang dilakukan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa (QS al-Ahzab [33]: 70). Dalam konteks komunikasi, kata qaulan tidak hanya berarti ucapan secara lisan, tetapi sekaligus ucapan melalui tulisan.

E. KESIMPULAN

Untuk menyimpulkan dari uraian di atas ada tiga falsafah Jawa yang sangat melekat dalam kehidupan. **Pertama** *Lamun sira sekti, ojo mateni*. Meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. **Kedua** *Lamun siro banter, ojo ndhisiki*. Meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. **Ketiga** *Lamun sira pinter ojo minteri*. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Mengkritik siapapun harus menggunakan tata karma, sopan santun dan adat istiadat ketimuran yang mengenal unggah-ungguh. Apalagi yang dikritik orang yang lebih tua dari kita dan mewakili simbol-simbol negara.

Komunikasi politik dibutuhkan sopan santun, akhlak, tata krama, adat istiadat. Meski materi yang disampaikan dibutuhkan cara yang elegan agar tidak menyinggung orang lain. Komunikasi politik yang ditumpangi perasaan tidak suka akan menghasilkan pesan yang menyakitkan penerima pesan sehingga dibutuhkan kedewasaan dalam memilih diksi, kata dan gambar yang tepat dalam menyampaikan kritik kepada orang lain agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Belli Nasution “Komunikasi Politik” Disajikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi, 2012
- Dewa Ayu Hendrawathy Putri, “Difusi Inovasi Pemasaran Politik Indonesia” Jurnal Communication vol 4. No. 2 (Oktober 2013) hal. 70
- Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian (Kualitatif & kuantitatif), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.32.

Johannesen, Richard L. 1996. Ethics in Human Communication. Prospect Heights, III. Waveland Press.

Rully Choirul Azwar, Poltik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era (Jakarta: Grasindo, 2009) hal. 26.

Media Online

- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/237723/tiga-falsafah-jawa-pegangan-jokowi>
- <https://jurnaliainpontianak.or.id>
- Kompas.com, 30/06/2021
- Detik.com Senin (28/6/2021).